

## EFEKTIVITAS PROGRAM KB DENGAN METODE OPERASI PRIA (MOP)/VASEKTOMI DI KABUPATEN SITUBONDO

Senain<sup>1)</sup> Hari Susanto<sup>2)</sup> Arsyah Chairul Fajri<sup>3)</sup>

<sup>1,2)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh

<sup>3)</sup> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to know the effectiveness of KB program implementation with MOP / Vasectomy in Situbondo Regency. The research method used qualitative approach. The data source is divided into two namely primary data and secondary data. Data collection uses observation, documentation and interviews. Data analysis consists of data reduction, data presentation, and conclusion or verification. Based on the results of the analysis showed that KB MOP (Male Operation Method) / Vasectomy in Situbondo Regency is ineffective and it is said because of socio-cultural condition of society that can not eliminate misperception of KB MOP program. The strategy set by the organizer that is Socialization to the community has not been fully implemented. There is no synchronization from the respective Party / Office concerned on Policy Formulation, Planning Process and Programming to the community. Infrastructure facilities of the MOP KB program, especially in Medical Personnel is still inadequate. Due to the limited number of medical workers involved in the MOP program KB is not effective and efficient.*

*Keywords: effectiveness, Family planning, MOP*

### PENDAHULUAN

Pemerintah melalui BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) telah menyediakan banyak alat kontrasepsi KB yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis alat kontrasepsi yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah yaitu KB MOP/Vasektomi. Program KB MOP dibuat oleh Pemerintah sebagai wujud dari adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam upaya menanggulangi jumlah kelahiran. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 menjelaskan bahwa partisipasi pria menjadi salah satu indikator terpenting keberhasilan

program KB dalam memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Gronroos (dalam Ratminto, 2005: 2). Menurut Kurniawan (dalam Sinambela, 2006:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Menurut UU No.25/2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Program KB (Keluarga Berencana) merupakan sebuah program nasional yang dicetuskan oleh Pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat padat membuat Pemerintah mencetuskan program KB dengan tujuan untuk mengatur jarak kelahiran demi tercapainya keluarga sejahtera dan berkualitas. Menurut buku Pedoman Tata Cara Kerja PLKB dalam Program Kependudukan dan KB Nasional Tahun 2012, Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pedewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera menuju keluarga yang berkualitas.

MOP/Vasektomi adalah Suatu metode kontrasepsi operatif minor pada pria yang sangat aman, sederhana dan sangat efektif, memakan waktu operasi yang singkat dan tidak memerlukan anestesi umum (Hartanto, 2004 ).

Tetapi di seluruh dunia, kontap-pria masih merupakan metode yang “terabaikan” dan kurang mendapat perhatian, baik dari pihak pria/suami maupun petugas medis Keluarga. Saat ini, meskipun telah tersedia fasilitas untuk tindakan reversal/pemulihankembali/reanastomosis/rekanalisa vasdeferens (seperti jaga pada kontap-wanita), kontap-pria atau vasektomi dianggap sebagai suatu metode permanen dan keberhasilan reversibilitas tidak dapat dijanin sepenuhnya.

Vasektomi sebenarnya telah dikenal orang sejak lama. Pada abad 19, para ahli bedah telah melakukan vasektomi untuk tujuan pengobatan: mencegah infeksi kelenjar prostat atau pada hipertrofi kelenjar prostat. Operasi pria yang biasa dikenal dengan nama Vasektomi merupakan operasi ringan, murah, aman, dan mempunyai arti demografis yang tinggi, artinya dengan operasi ini banyak kelahiran dapat dihindari. Vasektomi / MOP merupakan metode sterilisasi atau operasi pada laki-laki. Penutupan duktus spermatikus (vas deferens) dapat dilakukan dengan cara diikat (ligasi) dan vasektomi yang dilakukan dengan cara pemotongan vas deferens dari kantongnya (zakar) ke penis untuk mencegah lewatnya sperma. Sama seperti sterilisasi perempuan, tindakan ini dilakukan dengan anestesi lokal atau anestesi umum(Uliyah,2009). Pemotongan ataupun penyumbatan pada vas deferens dapat dicapai, baik dengan insisi tunggal di garis tengah maupun dengan dua insisi, satu di masingmasing insisi. Pria yang baru di vasektomi tidak langsung menjadi steril, karena di dalam saluran

proksimal vas deferens dan dalam vesika seminalis masih terdapat puluhan bahkan ratusan juta sperma. Karena itu pada waktu pulang berikan juga 15 buah kondom, yang harus dipakai setiap koitus. Pria baru bisa steril (mandul) biasanya setelah 10-15 kali ejakulasi.

Pencapaian KB MOP/Vasektomi Kabupaten Situbondo menunjukkan pencapaian KB MOP tertinggi terjadi pada tahun 2010 dimana dari target 363 PPM yang ditetapkan Pemerintah Pusat Kabupaten Situbondo berhasil merealisasikan dengan jumlah 1552 dan pada tahun 2011 berhasil merealisasikan 1848 dari target 1500 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi, pada tahun 2010 dan 2011 Kabupaten Situbondo meraih Rekor MURI atas pencapaian KB MOP terbanyak.

Program KB MOP di tahun 2016 pada masing-masing Kecamatan ada yang sudah memenuhi target, ada yang kurang memenuhi target, dan juga ada yang tidak ada sama sekali peminat MOP. Kecamatan yang memenuhi target pencapaian MOP yaitu Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng, Jangkar, Panji, dan Mlandingan. Kecamatan yang tidak memenuhi target yaitu Kecamatan Situbondo, Banyuglugur, Kendit, Arjasa, Asembagus, Suboh, dan Bungatan. Dan Kecamatan yang tidak ada sama sekali peminat KB MOP yaitu Kecamatan Mangaran, Panarukan, Besuki, dan Kapongan. Peminat MOP di Kabupaten Situbondo dapat dikatakan menurun daripada tahun sebelumnya, pada tahun 2016 Kabupaten Situbondo hanya memenuhi 171 Akseptor KB MOP dari target 312 yang telah

ditentukan oleh Pemerintah. Jadi Kabupaten Situbondo hanya dapat memenuhi 55% dari PPM/Target yang telah ditentukan. Jadi dari selisih jumlah target MOP dan jumlah akseptor yang telah dicapai yaitu 55%, dikatakan program KB MOP/Vasektomi di Kabupaten Situbondo tidak efektif dan sudah dinilai lebih dari cukup karena lebih dari 50%.

Berkaitan dengan efektivitas, pelaksanaan suatu pelayanan publik tentang program KB MOP harus dilakukan secara efektif agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu terwujudnya penduduk yang seimbang dan keluarga yang sejahtera. Untuk mengetahui dari suatu implementasi, maka kita harus memiliki penilaian terhadap program tersebut. Efektivitas dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sesuai yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif, dan jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan sudah tepat sehingga menyebabkan tujuan tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan efektif. Selanjutnya, peneliti membuat penelitian pada program KB MOP/Vasektomi di Kabupaten Situbondo, karena di daerah tersebut mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat khususnya kaum pria

terhadap program KB MOP/Vasektomi. Dengan demikian, sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang “Efektivitas Program KB Dengan Metode Operasi Pria (MOP)/Vasektomi di Kabupaten Situbondo”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas pelaksanaan program KB dengan MOP/Vasektomi di Kabupaten Situbondo.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan dan jenis Penelitian**

Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan juga dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln 2009 (dalam Juliansyah, 2011:33), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

### **2. Sumber data**

Sumber data menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Sumber data berasal dari

organisasi, masyarakat, sistem, hewan, tumbuhan, bahan, alat, dan lain-lain. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Menurut Silalahi (2012:289), Sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku. Sumber data primer yang di peroleh peneliti dalam penelitian ini ialah melalui wawancara dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan kepada informan terkait Efektivitas program KB Dengan Metode Operasi Pria (MOP)/Vasektomi di Kabupaten Situbondo.

#### **b. Data Sekunder**

Menurut Silalahi (2012:289), Sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Efektivitas Program KB MOP di Kabupaten Situbondo.

### **3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data diperlukan adanya teknik yang tepat dan sesuai dengan data yang akan diperoleh, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam memperoleh data tersebut. Karena data yang akan diperoleh bermacam-macam, maka untuk mendapatkan data yang diinginkan akan digunakan beberapa

teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi sistematis. Menurut Usman dan Akbar (2009:54) Pengertian teknik observasi yang *observer* terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sistematis menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangka yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung dan membuat kerangka observasi terlebih dahulu untuk mengamati Efektivitas Program KB MOP di Kabupaten Situbondo

b. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berguna untuk mendukung data-data dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang berkaitan dengan jumlah peserta baru KB MOP Kabupaten Situbondo di Kabupaten Situbondo, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:128) wawancara dibagi menjadi: 1) Wawancara oleh tim atau panel 2) Wawancara tertutup atau wawancara terbuka 3) Wawancara riwayat secara lisan 4) Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti dalam penelitian ini

menggunakan teknik wawancara terbuka dan terstruktur, dengan teknik wawancara tersebut akan memudahkan peneliti untuk menggali informasi dari informan terkait masalah yang diteliti.

Untuk mengetahui efektivitas program KB MOP/Vasektomi di Kabupaten Situbondo, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang sangat mengetahui program KB MOP ini. Informan terdiri dari Kepala Seksi Pembina Kesertaan ber-KB di Disdaldud dan KB, Koordinator PLKB di 3 Kecamatan (Jatibanteng, Situbondo, dan Jangkar), dan Masyarakat peserta KB MOP sebanyak 6 orang.

#### 4. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Berdasarkan definisi mengenai teknik analisis data tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses siklus analisis data kualitatif iniberlangsung dari sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data hingga sesudah pengumpulan dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan

yang mendalam terkait masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo adalah nama SKPD baru di Kabupaten Situbondo. Dinas ini sudah lama berdiri, sebelumnya Dinas masih bernama kantor yaitu Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo. Sesuai dengan kebijakan Bupati Situbondo yang mengubah semua Kantor menjadi Dinas, Kantor Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 diganti menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki motto yaitu “Bekerja Ikhlas Melayani Dengan Tulus” dan juga memiliki Visi dan Misi yaitu:

Visi : Penduduk Seimbang Keluarga Sejahtera

Misi : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Dua Bidang dan Lima Seksi yaitu:

1). Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari Tiga Seksi yaitu:

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan
- b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

2.). Bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

a. Seksi Jaminan Ber KB

b. Seksi Pembina Kesertaan Ber KB  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo juga mempunyai UPTD di Setiap Kecamatan. UPTD ini terdiri dari PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana).

### Pelaksanaan Program KB MOP/Vasektomi di Kabupaten Situbondo

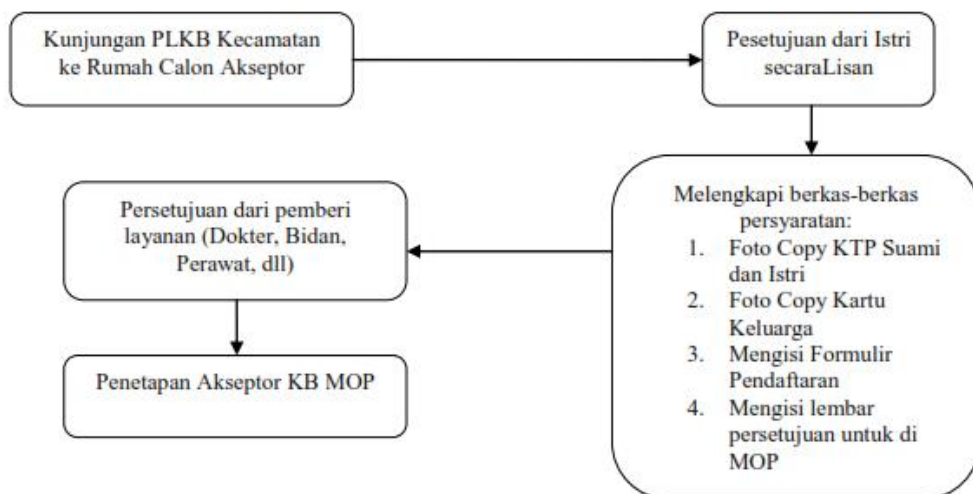
Pembangunan Keluarga Berencana merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, dan merupakan investasi jangka panjang. Tanpa perencanaan dan pengaturan, pertumbuhan penduduk dapat sangat tinggi dan akan mengakibatkan kemiskinan. Program Keluarga Berencana juga telah menyepakati paradigma baru, dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi lebih ke arah pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender. Namun, dikaitkan dengan masalah kesetaraan dan keadilan gender, dalam program KB dan kesehatan reproduksi masih dijumpai berbagai masalah kesenjangan gender yang perlu diperhatikan dan dikurangi agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Kabupaten Situbondo sebagai Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur



merupakan salah satu Kabupaten yang ikut melaksanakan program KB nasional khususnya KB MOP/Vasektomi. Pelaksanaan program KB MOP yang ada di Kabupaten Situbondo terdapat para petugas untuk mengelola program KB MOP yang terdiri dari dinas instansi pemerintah (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), maupun instansi swasta. Pelaksanaan program KB MOP dilapangan pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki petugas pengelola program KB MOP dilini lapangan seperti ditingkat kecamatan dan tingkat desa. Ditingkat kecamatan sendiri dalam pengelolaan program KB MOP ada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) yang bertugas melakukan penyuluhan tentang program KB MOP. Pelaksanaan pelayanan KB MOP di Kabupaten Situbondo biasanya dilaksanakan tiga kali pertahun dan terbagi lima wilayah pelayanan, yaitu:

1. Wilayah Tengah I (Situbondo, Panji, Mangaran, dan Kapongan) bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
2. Wilayah Tengah II (Panarukan dan Kendit) bertempat di Kantor Kecamatan Panarukan
3. Wilayah Barat I (Bungatan, Mlandingan, dan Suboh) bertempat di Kantor Kecamatan Bungatan.
4. Wilayah Barat II (Suboh, Besuki, Jatibanteng dan Banyuglugur) bertempat di Kecamatan Besuki.
5. Wilayah Timur (Arjasa, Asembagus, Jangkar, dan Banyuputih) bertempat di Kecamatan Jangkar.

Dalam mencari calon akseptor KB MOP, pihak penyelenggara tidak sembarangan mengikutsertakan calon akseptor tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh para calon akseptor KB MOP. Berikut ini adalah alur dalam menetapkan akseptor KB MOP:



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Situbondo

Menurut Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa alur pertama untuk menetapkan calon akseptor KB MOP yaitu Kunjungan PLKB ke rumah calon akseptor. Selanjutnya, melakukan diskusi secara lisan kepada istri untuk menyetujui suaminya akan diikuti KB MOP, Kemudian calon akseptor harus melengkapi persyaratan-persyaratan yaitu foto copy KTP dan Kartu keluarga, Mengisi formulir pendaftaran, serta mengisi lembar persetujuan untuk mengikuti MOP yang telah disediakan oleh PLKB setempat, Terakhir yaitu penetapan akseptor KB MOP melalui pelaporan PLKB Kecamatan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

Program KB MOP saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, antara lain akses terhadap pelayanan KB yang perlu diprioritaskan secara seimbang serta kualitas pelayanan yang masih rendah sehingga kegagalan dan komplikasi masih cukup tinggi. Sebagian dari permasalahan tersebut dapat dihindari apabila para petugas dapat melaksanakan tugasnya secara tepat dan benar, diimbangi dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang haknya untuk memperoleh pelayanan bermutu. Suatu program akan dikatakan berhasil jika tujuan yang diinginkan tercapai. Dengan melihat banyaknya masyarakat

Kabupaten Situbondo yang tidak mengerti tentang Metode Operasi Pria (MOP) menandakan bahwa proses penyampaian informasi belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga

sampai saat ini tujuan belum tercapai secara maksimal. Selain itu, rendahnya peranserta pria di Kabupaten Situbondo dalam KB MOP juga menunjukkan program ini masih belum efektif.

### **1. Sasaran dan Tujuan Program KB MOP**

Sasaran program KB MOP sudah terealisasi. Program KB MOP ini sudah tepat sasaran yang diperuntukkan bagi kaum pria yang mempunyai dua anak lebih. Tujuan utama dari MOP yaitu untuk mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk. Karena pertumbuhan penduduk yang sangat pada akan menimbulkan permasalahan perekonomian di dalam masyarakat.

### **2. Strategi Dalam Pencapaian Program KB MOP/Vasektomi**

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, dapat dijelaskan bahwa melakukan giat sosialisasi dan pendekatan kepada semua pihak menjadi strategi khusus yang digunakan penyelenggara untuk pencapaian KB MOP. Tetapi masyarakat masih menilai, bahwa penyelenggara kurang giat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan bukti munculnya isu-isu yang tidak benar tentang KB Metode Operasi Pria (MOP). Jadi dapat disimpulkan strategi yang digunakan oleh penyelenggara belum sepenuhnya dilaksanakan.

### **3. Perumusan Kebijakan**

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan



suatu kebijakan public. Perumusan kebijakan juga menjadi salah satu unsur agar terlaksananya suatu program Pemerintah. Perumusan kebijakan yang mantap akan menjadikan suatu program tersebut akan terlaksana dengan baik dan tujuan-tujuan yang ditentukan akan tercapai. Begitu juga dengan program KB MOP, program ini harus dengan perumusan kebijakan yang mantap, agar program ini dapat dikatakan berhasil.

#### **4. Proses Perencanaan**

Sebelum suatu program diimplementasikan, sudah pasti melalui proses perencanaan yang tersusun rapi. Karena proses perencanaan merupakan tahap awal agar suatu program dapat mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang akan hendak dicapai. Proses Perencanaan yang matang dan tersusun rapi akan membuat program itu akan berjalan sesuai dengan harapan yang dihendak dicapai. Program KB MOP di Kabupaten Situbondo sudah dikatakan baik, karena dari proses awal sampai pencapaian akseptor tidak ada kendala-kendala yang terjadi

#### **5. Proses Penyusunan Program**

Penyusunan Program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat. Sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Penyusunan program yang tepat akan membuat pelaksana mempunyai pedoman dalam melakukan implementasi program tersebut. Proses penyusunan program

KB MOP di Kabupaten Situbondo sudah tersusun dengan tepat. Fungsinya agar pelaksana mempunyai pedoman dalam pelaksanaan program KB MOP

#### **6. Sarana Prasarana**

Keberhasilan suatu program pemerintah perlu dibutuhkan sarana prasarana yang memadai agar program tersebut dapat dikatakan efektif. Sarana prasarana merupakan faktor yang terpenting dalam pengimplementasian suatu program. Sarana prasarana yang tidak memadai akan menyebabkan kendala-kendala dalam proses implementasi pada suatu program. Begitu pula juga dengan program KB MOP sendiri di Kabupaten Situbondo. Sarana-prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program KB MOP yaitu fasilitas tempat, fasilitas transportasi akseptor, alat-alat medis, dan petugas medis yang profesional dan ahli. Pada fasilitas tempat sudah ada yang namanya MOYAN (Mobil pelayanan) yaitu Mobil tempat operasi atau MOP, fasilitas angkutan akseptor sudah disediakan oleh Dinas terkait, alat-alat medis yang memadai, alat KB MOP sering disebut juga KB KIT, dan yang terakhir petugas medis yang profesional dan sudah terlatih. Pelatihan yang diikuti petugas medis yaitu disebut VTP (Vasektomi Tanpa Pisau).

#### **7. Efektifitas dan Efisiensi**

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy

(2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

### **8. Sistem Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Implementasi suatu program pemerintah sangat diperlukan adanya sistem pengawasan. Sistem pengawasan program KB MOP sendiri di Kabupaten Situbondo dipantau langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo di Bidang Keluarga

Berencana. Selain dari Dinas terkait, sistem pengawasan KB MOP di masing masing kecamatan juga diawasi langsung oleh pihak kecamatan seperti Camat, Sekretaris Camat, dll.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian di lapangan dan melakukan wawancara kepada informan, menyimpulkan bahwa program KB MOP (Metode Operasi Pria) di Kabupaten Situbondo tidak efektif. Telah ditemukan permasalahan-permasalahan didalam masyarakat tentang pelaksanaan program KB MOP yaitu:

1. Kondisi sosial budaya masyarakat yang tidak dapat menghilangkan persepsi yang salah terhadap program KB MOP.
2. Strategi yang ditetapkan oleh penyelenggara yaitu Sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan.
3. Tidak ada sinkronisasi dari Pihak Penyelenggara/Dinas terkait tentang Perumusan Kebijakan, Proses perencanaan, dan Penyusunan Program terhadap masyarakat.
4. Sarana prasarana dari program KB MOP tersebut khususnya di Tenaga Medis masih kurang memadai. Karena terbatasnya jumlah tenaga medis mengakibatkan program KB MOP ini tidak efektif dan efisien.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pria peserta KB dan Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), maka

ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Bagi Peserta KB MOP

a. Tetap setia pada pasangannya meskipun telah memilih alat/metode kontrasepsi yang aman dan nyaman seperti vasektomi karena tidak menimbulkan efek samping misalnya kehamilan.

b. Pria peserta KB bersama pasangan menambah pengetahuan/informasi tentang KB baik berasal dari penyuluhan- penyuluhan maupun datang ke Balai Penyuluhan KB yang ada di Kecamatan, Klinik, Puskesmas, maupun Bidan terdekat.

c. Agar bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KB untuk memotivasi masyarakat terutama pria untuk bisa ikut berpartisipasi langsung dalam program KB.

2. Bagi Masyarakat Luas

a. Menghilangkan persepsi yang salah terhadap program KB MOP/Vasektomi

b. Harus banyak bertanya tentang KB MOP/Vasektomi kepada para peserta KB MOP, PLKB, Dokter, maupun Bidan

3. Bagi Pihak Penyelenggara KB MOP (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan PLKB Kecamatan)

a. Melakukan sosialisasi tentang KB pria kepada masyarakat melalui PLKB yang ada di Kecamatan.

b. Harus sering melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat kalau KB MOP itu aman dan halal. Memperbaiki sejumlah sarana prasarana khususnya ditenga medis yang harus ditambah jumlahnya agar program ini dapat berjalan efektif dan efisien.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar & Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartanto, Hanafi. 2004, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Juliansyah, Noor. 2011, *Metodologi Penelitian*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember 2012
- Ratminto & Atik. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Silalahi, Ulber. 2012 . *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Uliyah Musrifatul dan A. Azis Alimul Hidayat. 2009. *Keterampilan Dasar Praktik Klinik Untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.